

**Pemberdayaan Orang Asli Papua Melalui UMKM Guna Meningkatkan Perekonomian  
Di Kabupaten Merauke**

**Nadia Rizki Amalia Mustafa<sup>1</sup>, Makdika Bismar Marulitua<sup>2</sup>, Olivia Semebe Kahol<sup>3</sup>, Yohanis E  
Teturan<sup>4</sup>, Edoardus E. Maturbongs<sup>5</sup>.**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Indonesia  
email: [endesteturan@unmus.ac.id](mailto:endesteturan@unmus.ac.id)

(Diterima Agustus 2024; Disetujui Agustus 2024; Dipublikasikan September 2024)

**Abstrak**

*Penelitian ini berjudul Pemberdayaan Orang Asli Papua Melalui UMKM Guna Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Merauke. Permasalahan yang melatar belakangi peneliti untuk mengambil judul ini adalah pemasaran dari produk-produk umkm yang masih belum optimal dan kurangnya sarana prasarana yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan orang asli papua melalui umkm di kabupaten merauke, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Oos M. Anwas tentang pemberdayaan khususnya pemberdayaan masyarakat. Teori ini memiliki beberapa dimensi yaitu (1) masyarakat, (2) nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, (3) partisipasi masyarakat, (4) fasilitator, (5) aspek sosial dan ekonomi. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu mengadakan pelatihan, penyuluhan, dan membangun Networking untuk menunjang pemberdayaan para pelaku umkm. Dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat faktor penghambat seperti hambatan bagi para pelaku umkm dalam memasarkan atau menjual produk-produknya, juga minimnya anggaran dalam memberdayakan para pelaku umkm. Saran dari peneliti adalah agar dapat membantu meningkatkan fasilitas-fasilitas dengan optimal agar maksimal dalam membantu para pelaku umkm.*

*Kata Kunci : Pemberdayaan, UMKM, Peningkatan Perekonomian*

**Abstract**

*This thesis is entitled Empowering Indigenous Papuans Through MSMEs to Improve the Economy in Merauke Regency. The problem behind the researcher taking this title is the marketing of MSME products which is still not optimal and the lack of adequate infrastructure. The purpose of this study was to find out how indigenous Papuans empowered through UMKM in Merauke district, the inhibiting factors and efforts made to overcome these problems. This study uses Oos M. Anwas's theory of empowerment, especially community empowerment. This theory has several dimensions, namely (1) community, (2) cultural values and local wisdom, (3) community participation, (4) facilitators, (5) social and economic aspects. Primary data sources were obtained from interviews and observations, while secondary data were obtained from documentation. The results of this research are conducting training, counseling, and building networking to support the empowerment of MSME actors. In the implementation of empowerment there are inhibiting factors such as obstacles for MSME actors in marketing or selling their products, as well as the lack of budget in empowering MSME actors. Suggestions from researchers are to be able to help improve facilities optimally so that they can maximally help MSME actors.*

*Keywords: Empowerment, MSMEs, Economic Improvement.*



## **PENDAHULUAN**

Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara maju karena sampai saat ini masih bermunculan masalah sosial. Pada umumnya, masalah sosial diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau nilai, norma dan standar sosial yang berlaku. Indonesia juga merupakan negara dunia ketiga yang mana struktur sosial masing-masing lapisan masyarakatnya berkembang ke arah yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan semakin lebarnya jurang kaya-miskin sehingga yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah sosial terbesar di zaman ini. Penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yaitu : (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik motivasi maupun penguasaan manajemen dan teknologi, (2) kelembagaan yang belum mampu menjalankan pelaksanaan pembangunan, (3) sarana dan prasarana yang belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan, (4) masih sangat minim modal, (5) berbelitnya prosedur dan peraturan yang berlaku. Kelemahan - kelemahan ini menyebabkan kaum miskin tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga kesempatan ini di ambil oleh kelompok- kelompok dari sektor kaya dan mampu. Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi pembangunan masyarakat itu sendiri.

Adapun pemberdayaan itu sendiri ialah upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia melalui pendidikan dasar dan pemberdayaan juga memperbaiki distribusi yang nyata. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidamampuannya baik karena factor internal maupaun eksternal. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Dewasa ini pemberdayaan masyarakat telah menjadi agenda penting pemerintah, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan di masa lampau. Pemberdayaan dilaksanakan oleh setiap daerah agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk bertahan di era globalisasi yang tiap tahunnya menghasilkan inovasi yang terbaru. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kreativitas masyarakat kecil yang dapat menopang kegiatan ekonomi. Hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah serius ingin meningkatkan mutu sumber daya manusia yang lebih baik. Sehingga dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pemberdayaan yang diperlukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini mendorong kepada setiap daerah agar dapat memberdayakan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Menurut data *World Bank*, sumber pendapatan Indonesia salah satunya sangat bergantung pada pada sektor usaha mikro.

Pada tahun 2020 sektor UKM menyumbang sekitar 61.7% PDB (umumnya berada di sektor perdagangan dan pertanian). Sektor UKM pada saat ini menjadi pilar utama perekonomian khususnya dalam hal penampungan jumlah tenaga kerja yang terserap sehingga menjadi sector yang dapat membantu mengurangi tingginya angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dewasa ini permasalahan yang terjadi pada perkembangan UKM di Indonesia mempunyai permasalahan terhadap kurangnya fasilitas, pembinaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), modal usaha, kurangnya jaringan kerja sama usaha, juga market place dalam pengembangan usaha tersebut. Pembangunan dan pengembangan industry kecil seperti UKM merupakan salah satu bagian dari program pembangunan ekonomi nasional. Saat ini pelaku UMKM masih banyak yang bergantung pada strategi pemasaran dengan informasi dari mulut ke mulut. Ini merupakan strategi yang yang tidak efektif, terlebih lagi saat ini pasar terus mengalami perkembangan dan persaingan yang semakin ketat. Di era reformasi ini pemerintah melalui program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) telah telah berbenah dalam menangani masalah perekonomian desa. Salah satu program pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan juga angka kemiskinan adalah dengan cara Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2017), Kabupaten Merauke menjadi salah satu bagian dari 29 wilayah di Provinsi Papua yang terletak disebelah selatan dan terluas apabila dibandingkan dengan daerah atau kota lain di Provinsi Papua. Kabupaten Merauke tahun 2017 mempunyai luas wilayah 46.791,63 km<sup>2</sup>, yang menaungi 22 distrik, 11 kelurahan dan 179 kampung. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke mencatat jumlah penduduk di Kabupaten Merauke pada tahun 2021 mencapai 231.699 ribu jiwa. Pada tahun 2017 tingkat pertumbuhan penjualan UMKM sektor industri kecil formal di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan dari 3,5% menjadi 4,2%. Secara keseluruhan kinerja UMKM sektor industri kecil formalmengalami peningkatan tetapi masihtergolong rendah.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke tahun 2019 data pengangguran di kabupaten Merauke menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 1.489 jiwa dan perempuan 1.473 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat tingkat pengangguran di kabupaten Merauke masih tergolong tinggi hal tersebut tidak memenuhi eksptasi pemerintah daerah karena masih di dominasi oleh orang asli papua. Peningkatan pendapatan masyarakat pelaku UMKM di Merauke menjadi fokus utama pemerintah daerah karena pendapatan yang masih kecil dengan pengeluaran untuk bahan pokok yang semakin meningkat. Berikut tabel data jumlah pengangguran di merauke menurut badan pusat statistik tahun 2019.

**Tabel 1.1**  
**Data Pengangguran di Kabupaten Merauke menurut jenis kelamin Tahun 2019**

| Kabupaten | Pengangguran Menurut Jenis Kelamin |      |       |           |       |       |
|-----------|------------------------------------|------|-------|-----------|-------|-------|
|           | Laki - Laki                        |      |       | Perempuan |       |       |
| Merauke   | 2017                               | 2018 | 2019  | 2017      | 2018  | 2019  |
|           | 1.340                              | 778  | 1.489 | 1.899     | 1.187 | 1.473 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke (2020)

Menurut data dari dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Merauke, kendala Orang asli papua dalam memulai usaha dan mengembangkan UMKM mereka seperti ; (1) Kurangnya modal untuk membuka usaha serta sulitnya mendatangkan sarana dan prasarana dari luar daerah; (2) Semakin tingginya persaingan dengan usaha-usaha masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman. Masalah tersebut yang menjadikan Orang asli papua semakin sulit untuk mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan uraian di atas dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten Merauke diharapkan mampu dalam berperan aktif dan memberi kebijakan serta bantuan modal kepada orang asli papua dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM mereka. Dengan harapan Orang asli papua dapat bersaing dan bertahan dalam persaingan di dunia UMKM dengan memanfaatkan hasil dari produk-produk lokal khas kabupaten Merauke. Hal ini juga akan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat luar tentang budaya dan barang-barang kerajinan khas Kabupaten Merauke.

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke juga mengetahui kelebihan dan kekurangan serta mengatasi masalah yang muncul di lokasi penelitian. Penetapan metode ini berlandaskan pada tujuan peneliti untuk mengidentifikasi metode, mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Anwas (2014:58-60), dalam melakukan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, lembaga pemberdayaan perlu menggunakan beberapa prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar, sehingga sesuai dengan konsep pemberdayaan dan hakikatnya. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis fokus penelitian berdasarkan perspektif legalistic dan teoritis. Berikut analisis fokus penelitian berdasarkan perspektif legalistik dan teoristik.

Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat, untuk itu pemerintah membuat kebijakan tentang pemberdayaan yang salah satunya yaitu pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah diatur dalam undang-undang sehingga kebijakan tersebut dijadikan landasan dasar pemerintah untuk melakukan pemberdayaan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Merauke sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Merauke. Pemberdayaan masyarakat tentunya mempunyai unsur utama dalam pemberdayaan yaitu masyarakat karena, menurut Anwas (2014) masyarakat merupakan unsur pertama yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, mengingat bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya. Proses pemberdayaan hanya akan berjalan dengan baik jika adanya kerjasama antar pihak pemberayaan (pemerintah)

dan pihak yang diberdayakan (masyarakat). Dalam dimensi pemberdayaan yaitu masyarakat menurut Anwas memiliki indikator yaitu :

### **1. Pemberdayaan yang fokus kepada Masyarakat**

Pemberdayaan yang berfokus pada masyarakat khususnya masyarakat (orang asli papua) para pelaku UMKM dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dalam rangka meningkatkan produktivitas agar tetap terjaga eksistensinya. Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke Bapak Eric Y. B. Rumlus, S.Sos mengatakan bahwa “Upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Merauke dalam melakukan pemberdayaan para pelaku UMKM yaitu dengan memberikan pelatihan, penyuluhan, dan membantu meningkatkan sarana dan prasarana”.

### **2. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal**

Menurut Anwas (2014) menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, yaitu menumbuhkan jati diri atau ciri khas masyarakat setempat dan menjaga budaya-budaya lokal, oleh karena itu nilai-nilai budaya dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan. Dalam dimensi pemberdayaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal memiliki indikator yaitu :

#### **a. Penumbuhan Nilai-Nilai Budaya**

Penumbuhan nilai-nilai budaya telah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Merauke secara turun-temurun dari nenek moyang yang tetap dilestarikan sampai sekarang. Termasuk juga para pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara turun-temurun, tetapi usaha yang dijalankan sulit berkembang dikarenakan banyak kendala yang dihadapi oleh para pelaku umkm itu sendiri.

#### **b. Menjaga Kearifan Lokal**

Untuk menjaga kearifan lokal tersebut dibutuhkannya partisipasi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk menunjukkan keberadaan dari para pelaku usaha sehingga dapat dikenal dan dapat menjadi ciri khas daerah tersebut.

### **3. Partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha kecil. Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pemberdayaan yang dilakukan. Jika tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pemberdayaan yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan semestinya. Pemerintah sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam tiap program yang akan dijalankan. Dalam dimensi pemberdayaan partisipasi masyarakat memiliki indikator yaitu:

#### **a. Wujud Partisipasi Masyarakat Bersifat Fisik (Materi, Tenaga, Bahan)**

Dalam indikator ini yang menjadi bagian dari partisipasi masyarakat bersifat fisik (materi, tenaga, dan bahan) yaitu untuk saat ini masyarakat kabupaten Merauke

*Pemberdayaan Orang Asli Papua Melalui UMKM Guna Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Merauke* sudah ikut membantu pemerintah dalam memberdayakan setiap pelaku usaha sehingga dapat mengembangkan perekonomian yang ada. Bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah yaitu dengan cara membantu memberikan tenaga mereka untuk membangun sarana dan prasarana penunjang bagi para pelaku umkm, partisipasi lainnya yaitu dengan ikut membantu mengikuti pelatihan dan mengajari hasil dari pelatihan tersebut dari generasi ke generasi selanjutnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan tentang wujud dan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara membantu memberikan tenaganya untuk meningkatkan produktivitas dan juga sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM yang akan berimbang kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Merauke.

#### **b. Wujud Partisipasi Masyarakat Bersifat Nonfisik (Saran, Waktu, Dukungan)**

Partisipasi masyarakat berupa saran, waktu, dan dukungan sangatlah dibutuhkan untuk membantu berjalannya suatu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat Kabupaten Merauke juga ikut berpartisipasi membantu pemerintah daerah dengan melakukan beberapa kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa masyarakat Kabupaten Merauke membantu pemerintah juga para pelaku umkm dengan dukungan juga membantu dengan cara memasarkan hasil-hasil usaha dari para pelaku umkm melalui akun-akun sosial media pribadi ataupun menjual kembali produk-produk dari para pelaku usaha tersebut. Selain itu, masyarakat juga memberikan waktunya untuk peningkatan kesejahteraan (dalam rangka pelatihan) dan dukungan terkait pembangunan infrastruktur pendukung UMKM.

## **4. Fasilitator**

Menurut teori Anwas (2014) lembaga pemberdayaan menjadi fasilitator yang memiliki kemampuan atau kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Fasilitator dapat diartikan sebagai penyalur atau yang membantu berjalannya proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.

## **5. Aspek sosiologi dan ekonomi**

Menurut teori Anwas (2014) tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengubah keadaan baik itu keadaan sosial dan ekonomi masyarakat untuk menjadi lebih baik dari sebelum diadakannya pemberdayaan. Oleh karena itu, pemerintah yang melakukan pemberdayaan harus melihat aspek sosial dan ekonomi untuk menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam dimensi aspek sosial dan ekonomi menurut Anwas (2014) memiliki indikator yaitu :

#### **a. Peningkatan Kesejahteraan**

Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Merauke menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

#### **b. Peningkatan Pendapatan**

Masyarakat para pelaku UMKM di Kabupaten Merauke mendapatkan dampak perekonomian yang cukup besar dikarenakan adanya program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti yang dikatakan oleh salah satu pelaku UMKM Noken di Kabupaten Merauke yaitu Ibu Martina yang mengatakan bahwa : “Produk-produk saya (anyaman) dari segi pemasarannya sudah cukup membaik, berkembang pesat dibandingkan sebelum diadakannya program-program dari pemerintah. Programnya yang dilakukan ialah dengan mengadakan pameran rutin, mengikuti lomba-lomba seni di tingkat provinsi maupun nasional juga bantuan modal usaha yang diberikan langsung dari pemerintah kepada kami”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan pendapatan dan meningkatnya kesejahteraan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Merauke**

#### ***Faktor-Faktor Pendukung***

Faktor pendukung dalam proses pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke yaitu :

##### **1. Pembinaan Dasar**

Pembinaan yang dilakukan adalah menumbuhkan tekad dan kepercayaan diri yang kuat terhadap pelaku usaha agar memiliki mental yang kuat dalam membuka usaha, karena tidak sedikit pelaku usaha yang gulung tikar tidak mau berusaha lagi membangun kembali usahanya sehingga melalui berbagai program yang telah ada diharapkan dapat menumbuhkan jiwa-jiwa usaha yang harus dimiliki para pelaku UMKM.

##### **2. Pembentukan Kelompok**

Usaha Kelompok usaha merupakan salah satu upaya dari pemerintah agar lebih mudah memberikan bantuan terhadap pelaku usaha mikro seperti pembentukan Kelompok Usaha Bersama yang beranggotakan beberapa pelaku usaha untuk bersama-sama meningkatkan hasil produksinya agar lebih unggul dan maksimal. Selain upaya yang dijelaskan diatas, Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Disperindagkop senantiasa mengikutsertakan para pelaku usaha pada setiap event yang ada seperti halnya festival di tingkat Kabupaten dan Provinsi yang secara rutin diadakan di Kabupaten Merauke.

##### **3. Ranah Penjualan Digital**

*Pemberdayaan Orang Asli Papua Melalui UMKM Guna Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Merauke*  
Disperindagkop telah berupaya membangun mitra kerja sama dengan beberapa pihak dalam rangka mempromosikan produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Erick selaku Kepala Dinas Perindagkop mengatakan bahwa “kami telah membangun kerja sama dengan berbagai dinas di Kabupaten Merauke untuk membuat forum *jual beli online* yang bertujuan untuk membantu memasarkan produk dari para pelaku UMKM”.

### **Faktor-Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, hambatan-hambatan yang ada dalam proses pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM Di Kabupaten Merauke yaitu :

#### **1. Modal**

Masalah utama yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha pada umumnya adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha. Mayoritas pelaku usaha mikro masih menggunakan modal sendiri dalam mengembangkan usahanya. Kebanyakan dari mereka memang lebih nyaman menggunakan modal sendiri karena tidak perlu membayar angsuran perbulan jika harus meminjam modal. Jika dilihat dari segi modal usaha yang digunakan oleh para pelaku UMKM ini untuk melakukan kegiatan produksinya dapat dikatakan masih sangat minim, karena modal yang didapat hanya dari hasil penjualan produksi sebelumnya yang kemudian digunakan untuk produksi selanjutnya.

#### **2. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Ketersediaan SDM yang terbatas dalam pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM masih banyak ditemukannya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal mengenai cara berbisnis yang baik dan benar. SDM yang tersedia kurang mengembangkan diri untuk bergerak lebih maju, kebanyakan dari mereka lebih suka melanjutkan kegiatan yang sudah ada atau mewarisi usaha keluarga tanpa ada pikiran untuk berinovasi dan mengembangkan usaha tersebut. Kesadaran para pelaku UMKM untuk membuat izin produksi juga masih kurang, padahal dengan adanya izin usaha membuat para pelaku usaha lebih mudah mendapatkan bantuan dan memudahkan dalam urusan pendataan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, dapat diketahui juga bahwa ,asih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin produksi. Banyak dari mereka yang membuka usaha berjalan seadanya tanpa berpikir untukmemajukan serta mengembangkan usahanya. Para pelaku usaha juga hanya memproduksi barang seadanya dan semampunya sesuai pesanan sehinggatarget yang ingin dicapai tidak jelas dan tidak ada perubahan untuk lebih baik kedepan.

#### **3. Manajemen**

Keterbatasan SDM terutama dari aspek kualitas berpengaruh terhadap tingkat manajemen UMKM yang rata-rata perlu perhatian lebih intensif. Para pelaku UMKM di Kabupaten Merauke mempunyai system manejerial yang belum baik. Pengelolaan usaha masih tradisional kurang memperhitungkan rencana produksi, keuangan, dan juga keuntungan.

#### **4. Pemasaran**

Kemampuan pelaku usaha dalam persaingan pasar masih tergolong rendah dan adanya harga pasar mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha. Pemasaran yang biasa dilakukan hanyalah berlangsung dari mulut ke mulut atau dari satu tempat ke tempat lainnya.

### **Upaya dinas dalam mengatasi faktor penghambat dalam pemberdayaan orang asli papua melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan tentu memiliki berbagai hambatan serta kendala yang harus dihadapi dengan berbagai solusi yang telah dirumuskan. Begitu juga dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM yang ada. Meskipun memiliki

beberapa faktor penghambat dalam proses pemberdayaan terdapat pula faktor pendukung yang bisa dijadikan peluang dalam upaya mengatasi hambatan yang sedang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui Disperindagkop ialah :

1. Mengubah pemikiran para pelaku UMKM dengan meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi;
2. Memberikan kemudahan pelayanan kepada para pelaku UMKM;
3. Membantu mengarahkan para pelaku UMKM untuk fokus pada kinerja produktivitas usahanya.

### **PENUTUP**

Kesimpulan penelitian ini adalah pemberdayaan orang asli papua melalui UMK di Kabupaten Merauke belum berjalan maksimal. Pemberdayaan telah dirumuskan bahkan telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, dalam pelaksanaannya pemberdayaan yang dilakukan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengembangan usaha. Terutama paradigma yang masih tersebar di masyarakat bahwa pemerintah masih kurang memberikan perhatian kepada para pelaku UMKM. Indikator yang menjadi tolak ukur proses pemberdayaan tersebut adalah ; (a) Fase Inisial, dimana Dinas Koperasi berperan penuh dalam memberdayakan pelaku UMKM melalui sosialisasi dan penyuluhan sehingga tercipta sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing. Akan tetapi sejauh ini, pemerintah sendiri masih jarang memberikan sosialisasi kepada UMKM sehingga berpengaruh terhadap perkembangan UMKM; (b) Fase Partisipatoris, dimana para pelaku UMKM sudah bisa melibatkan diri dan antusias dalam setiap program yang dibuat oleh pemerintah sehingga koordinasi antara Dinas dan para pelaku UMKM terjalin dengan baik. Dalam fase ini, dapat diketahui bahwa para pelaku UMKM mau melibatkan diri dan antusias dalam setiap program tetapi tidak berpikir sampai ke manfaat apa yang bakal didapatkan jika mengikuti program-program yang ada. Mereka melimpahkan sepenuhnya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; (c) Fase Emansipatoris, dimana Disperindagkop hanya berperan sebagai pendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Namun, sampai saat ini pun pemerintah masih belum bisa menjalankan perannya karena sebagian besar pelaku usaha yang ada belum menemukan kemampuan untuk memberdayakan usahanya sendiri.

Faktor penghambat pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke, antara lain ; (a) Rata-rata UMKM yang ada di Kabupaten Merauke masih bersifat tradisional; (b) Banyak program dari pemerintah yang tidak berjalan semestinya; (c) Kurangnya kesadaran dari para pelaku umkm untuk mengikuti program-program yang diberikan oleh pemerintah. Upaya Pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dalam pemberdayaan orang asli papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke adalah (a) Mengubah pemikiran para pelaku UMKM dengan meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi; (b) Memberikan kemudahan pelayanan kepada para pelaku UMKM; (c) Membantu mengarahkan para pelaku UMKM untuk fokus pada kinerja produktivitas usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. "Metode penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* (2010).
- Creswell, John W. *Research design, Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches Edisi ketiga*. Penerjemah: Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Edi, Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama, 2006.
- Haeruman, Hadhikusuma. "Peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung program pel." In *Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing, Graha Sucofindo, Jakarta, 2000*.
- Johnston, Deirdre D, dan Scott W VanderStoep. *Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches*. Jossey-Bass, 2009.
- Lune, Howard, dan Bruce L Berg. *Qualitative research methods for the social sciences*. Pearson, 2017.
- Malak, Stepanus. "Kapitalisasi tanah adat." *Cetakan II. Bandung: Yayasan Bina* (2006).
- Mardikanto, Totok. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Prijono, Onny S, dan Pranarka. *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996.
- Shafira, Adiba Jeyhan. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro." Universitas Brawijaya, 2018.
- Slamet, Margono. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: IKAPI, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendra, K, dan A Djueni Kadmasasmita. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta, 2006.

- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Sumodiningrat, Gunawan. “Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan.” *Yogyakarta: IDEA* (2000).
- Widjaja, Anton Wachidin. *Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Amar, Sahrul. “Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di KabupatenBima.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Deda, Andreas Jefri, dan Suriel Samuel Mofu. “Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian.” *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014).
- Lathifah, Ayuni. “Pemberdayaan masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.” *Universitas Negeri Semarang* (2019).
- Rudjito. “Strategi Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Bisnis, Makalah Yang Di Sampaikan Pada Seminar Peran Perbankan Dalam Memperkokoh Ketahanan NasionalKerjasama Lemhanas RI Dengan BRI,” 2003.
- Yanti, Rani. “Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Umkm Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Jambi.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan UsahaMilik Desa